2022

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

https//www.id.pn-sangatta.go.id
pn_sangatta@ymail.com
(0549) 21324

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, S.H No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta – Kutai Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 31 Januari 2023

Sekretaris,

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Arini Widiastuti, S.IP.

NIP. 197409182006042001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	7
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	8
	A. Penjelasan Umum	8
	B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
	C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
	D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
	E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI.	Lampiran - lampiran	36

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
Kelas II
Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324
Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511
pn-sangatta.go.id e-mail : pn_sangatta@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 31 Januari 2023

Sekretaris,

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Arini Widiastuti, S.IP.
NIP. 197409182006042001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.888.079 atau mencapai 13.00 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp5.286.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.270.710.563 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.288.326.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp8.169.454.158 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. Rp. 100.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.169.484.158 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.877.118 dan Rp8.160.707.040

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.521.750, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.4.515.479.769 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.4.508.958.019)Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.366.329 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp4.508.591.690).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.998.431.496 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp4.508.591.690) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.670.867.234 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp8.5160.707.040.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	5,286,000.	6,888,079.	1,602,079.	130	0.	6,796,368.	6,796,368.	0
	PENERIMAAN HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	5,286,000.	6,888,079.	1,602,079.	130	0.	6,796,368.	6,796,368.	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,990,527,000.	2,976,400,766.	(14,126,234.)	100	3,221,268,000.	3,200,841,095.	20,426,905.	99
	BELANJA BARANG	1,287,799,000.	1,284,409,797.	(3,389,203.)	100	1,031,374,000.	1,017,632,874.	13,741,126.	99
	BELANJA MODAL	10,000,000.	9,900,000.	(100,000.)	99	334,500,000.	334,458,000.	42,000.	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA SUBSIDI	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Bagl Hasll	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0

	Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Data Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Desa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,288,326,000.	4,270,710,563.	(17,615,437.)	100	4,587,142,000.	4,552,931,969.	34,210,031.	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	100,000.	100,000	0	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**100,000.**	**100,000**	**0**	**0.00**
ASET TETAP				
Tanah	3,279,400,000.	3,279,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,928,389,419.	2,511,444,669	416,944,750	16.60
Gedung dan Bangunan	4,873,641,500.	4,873,641,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,517,047.	27,517,047	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,939,463,808.)	(2,666,734,544)	(272,729,264)	10.23
JUMLAH ASET TETAP	**8,169,484,158.**	**8,025,268,672**	**144,215,486**	**1.80**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,900,000.	4,900,000	0	0.00
Aset Lain-lain	49,531,000.	49,531,000	0	0.00

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,431,000.)	(54,431,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0.**	**0**	**0**	**NaN**
JUMLAH ASET	**8,169,584,158.**	**8,025,368,672**	**144,215,486**	**1.80**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada PIhak KetIga	8,877,118.	26,937,176	(18,060,058)	(67.05)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**8,877,118.**	**26,937,176**	**(18,060,058)**	**(67.05)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**8,877,118.**	**26,937,176**	**(18,060,058)**	**(67.05)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekultas	8,160,707,040.	7,998,431,496	162,275,544	2.03
JUMLAH EKUITAS	**8,160,707,040.**	**7,998,431,496**	**162,275,544**	**2.03**
JUMLAH EKUITAS	**8,160,707,040.**	**7,998,431,496**	**162,275,544**	**2.03**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**8,169,584,158**	**8,025,368,672**	**144,215,486**	**1.80**

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	

Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,521,750.	6,796,350.	(274,600.)	(4.04)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,521,750.	6,796,350.	(274,600.)	(4.04)
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	
Jumlah Pendapatan	6,521,750.	6,796,350.	(274,600.)	(4.04)
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	
Beban Pegawai	2,966,118,946.	3,191,472,851.	(225,353,905.)	(7.061)
Beban Persediaan	37,136,750.	33,926,500.	3,210,250.	9.462
Beban Barang dan Jasa	688,743,540.	605,701,258.	83,042,282.	13.71
Beban Pemeliharaan	489,721,000.	309,207,019.	180,513,981.	58.38
Beban Perjalanan Dinas	61,030,269.	69,180,000.	(8,149,731.)	(11.78)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	
Beban Bunga	0.	0.	0.	
Beban Subsidi	0.	0.	0.	
Beban Hibah	0.	0.	0.	
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	272,729,264.	228,368,356.	44,360,908.	19.425
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	
Beban Transfer	0.	0.	0.	
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	
JUMLAH BEBAN	4,515,479,769.	4,437,855,984.	77,623,785.	1.749
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,508,958,019.)	(4,431,059,634.)	(77,898,385.)	1.758
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	366,329.	18.	366,311.	2,035,061.111
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	366,329.	18.	366,311.	2,035,061.111
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	366,329.	18.	366,311.	2,035,061.111
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,508,591,690.)	(4,431,059,616.)	(77,532,074.)	1.75
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,508,591,690.)	(4,431,059,616.)	(77,532,074.)	1.75

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS I

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,998,431,496.	7,883,149,511.	115,281,985.	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,508,591,690.)	(4,431,059,616.)	(77,532,074.)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0.	0.	0.	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	16,000.	(16,000.)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.	16,000.	(16,000.)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0.	0.	0.	-
SELISIH REVALUASI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	0.	0.	-
LAIN-LAIN	0.	0.	0.	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,670,867,234.	4,546,325,601.	124,541,633.	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	162,275,544.	115,281,985.	46,993,559.	-

EKUITAS AKHIR	8,160,707,040.	7,998,431,496.	162,275,544.	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akDesbilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelsaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran

yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah rupiah).

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2021. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku

sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan

bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat dIdentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

  Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan peluanasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian

laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp6.888.079

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 6.888.079** atau 130 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp5.286.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa pendapatan sewa rumah negara.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131)	5.286.000	6.888.079	130
Pendapatan Lain – lain (425911)	-	0	0
Jumlah	**5.286.000**	**6.888.079**	**130**

Realisasi pendapatan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan 31 Desember 2021.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)	0	0	0,00
Pendapatan Lain – lain (425911)	0	0	0,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	6.888.079	6.796.368	0,00
Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Jumlah	**6.888.079**	**6.796.368**	**(1)**

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp4,270,710,563

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4,270,710,563 atau 100 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.288.326.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	2,990,527,000	2,976,400,766	100
Belanja Barang	1.287.799.000	1.284.409.727.	100
Belanja Modal	10.000.000	9.900.000	99,00
Jumlah Belanja Kotor	**4.288.326.000**	**4.270.710.563**	**100**
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	**4.288.356.000**	**4.270.710.563**	**100**

Perbandingan Realisasi Belanja

Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 Desember 2022	ANGGARAN	REALISASI 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.990.727.000	2.976.400.766	3.221.268.000	3.200.841.095	1
Belanja Barang	1.287.799.000	1.284.409.727	1.031.374.000	1.017.632.874	1
Belanja Modal	10.000.000	9.900.000	334.500.000	37.500.000	0
Jumlah	**4.288.356.000**	**4.270.710.563**	**4.587.142.000**	**4.552.931.969**	**2**

Belanja Pegawai Rp2.976.400.766

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2.976.400.766 dan Rp 3.201.026.095.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DES 2022	REALISASI 31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.004.036.020	1.039.987.580	0,05
Belanja Pembulatan	18.427	17.017	10,68
Belanja Tunj. Suami / Istri	63.358.650	68.026.890	(0,77)
Belanja Tunj. Anak	17.719.474	20.544.054	2,64
Belanja Tunj. Struktural	23.240.000	28.140.000	1,95
Belanja Tunj. Fungsional	1.250.540.000	1.469.565.000	(0,02)
Belanja Tunj. Pph PNS	218.759.155	172.075.784	(0,52)
Belanja Tunj. Beras	55.184.040	58.225.680	2,8
Belanja Uang Makan	200.095.000	180.324.000	0,67
Belanja Tunj. Umum	15.200.000	7.520.000	4,4
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	128.250.000	156.600.000	3,33
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	**2.976.400.766**	**3.201.026.095**	**0,17**
Pengembalian Belanja Pegawai	**0**		**0**
Jumlah Belanja Pegawai	**2.976.400.766**	**3.201.026.095**	**0,17**

Belanja Barang Rp1.284.409.797

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.284.409.797 dan Rp1.017.632.874

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI 31 Des 2022	REALISASI 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	582.847.257	484.732.255	1,34
Belanja Barang Persediaan	37.136.750	33.994.500	(0,04)
Belanja Jasa	113.624.521	118.302.100	10,99
Belanja Pemeliharaan	489.771.000	309.157.019	0,16
Belanja Barang Non Operasional	0	2.267.000	100
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	61.030.269	69.180.000	(1,2)
Jumlah Belanja Barang Kotor	1.284.409.797	1.017.632.874	0,06
Pengembalian Belanja Barang	0	0	
Jumlah Belanja Barang	**1.284.409.797**	**1.017.632.874**	**0,06**

Belanja Modal Rp.9.900.000

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.9.900.000 dan Rp334.458.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.900.000	334.458.000	0,99
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja Modal	**9.900.000**	334.458.000	**0,99**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 653256629861000	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Persediaan Rp.100.000

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp100.000 dan Rp 100.000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau

untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan :

Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	100.000	100.000
Jumlah	**100.000**	**100.000**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp3.279.400.000

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.279.400.00 dan Rp3.279.400.000.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap tanah per 31 Desember 2022.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3.279.400.000
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	3.279.400.000
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	3.279.400.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.245 m2	Jl. Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No. 01 Sangatta	2.773.500.000
2	700 m2	Jl. Soekarno Hatta Komp Perumahan Dewa Ruci Sangatta	505.900.000
Jumlah			**3.279.400.000**

Peralatan dan Mesin
Rp2.928.389.419

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.928.389.419 dan Rp2.511.444.669.

Terdapat mutasi tambah berupa belanja modal peralatan dan mesin dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	9.900.000
Mutasi Tambah :	9.900.000
- Pembelian	9.900.000
- Hibah Masuk	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	2.928.389.419
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(2.939.463.808)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2.928.389.419

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp4.873.641.500

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.873.641.500 dan Rp4.873.641.500

Tidak terdapat mutasi tambah berupa belanja modal Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.873.641.500
Mutasi Tambah :	0
- Pembelian	0

Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	4.873.641.500
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(611.045.774)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	4.873.641.500

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp27.517.047

C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp27.517.047 dan Rp. 27.517.047

Tidak Terdapat mutasi kurang pada aset tetap lainnya per 31 Desember 2022.

Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2022	27.517.047
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2021	
Nilai Buku per 31 Desember 2022	27.517.047

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp2.939.463.808

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.939.463.808 dan Rp2.666.734.544:

Aset Tak Berwujud Rp4.900.000

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.900.000 dan Rp4.900.000. Aset tak berwujud ini merupakan Antivirus Kaspersky dengan lisensi selama 2 (dua) tahun.

Aset Lain-lain Rp49.531.000

C.9. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49.531.000 dan Rp49.531.000. Aset lain-lain ini berasal dari BMN yang dihentikan penggunaannya dan saat ini sedang diajukan usulan permohonan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Rp54.431.000

C.10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp54.431.000 dan Rp54.431.000.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.11. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 202 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp8.877.118

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.877.118 dan Rp26.937.176 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Hibah yang belum disahkan Rp0

C.13. Hibah yang belum disahkan

Pada pelaporan Tahun 2022 Satker Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tidak ada saldo hibah yang belum disahkan.

Ekuitas Rp8.160.707.040

C.14. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.160.707.040 dan Rp.7.998.431.496 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp6.521.750

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.521.750 dan Rp.6.796.350. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	6.521.750	6.796.350.
Jumlah	**6.521.750**	**6.796.350.**

Beban Pegawai Rp2.966.118.946

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.966.118.946 dan Rp3.191.472.851. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DES 2022	REALISASI 31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1.004.036.020	1.039.987.580	0,05
Belanja Pembulatan	18.427	17.017	10,68
Belanja Tunj. Suami / Istri	63.358.650	68.026.890	(0,77)
Belanja Tunj. Anak	17.719.474	20.544.054	2,64
Belanja Tunj. Struktural	23.240.000	28.140.000	1,95
Belanja Tunj. Fungsional	1.250.540.000	1.469.565.000	(0,02)
Belanja Tunj. Pph PNS	218.759.155	172.075.784	(0,52)
Belanja Tunj. Beras	55.184.040	58.225.680	2,8
Belanja Uang Makan	200.095.000	180.324.000	0,67
Belanja Tunj. Umum	15.200.000	7.520.000	4,4
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	128.250.000	156.600.000	3,33
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	**2.976.400.766**	**3.201.026.095**	**0,17**
Pengembalian Belanja Pegawai	**0**		**0**
Jumlah Belanja Pegawai	**2.976.400.766**	**3.201.026.095**	**0,17**

Beban Persediaan Rp37.136.750

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp37.136.750 dan Rp 33.926.500 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa Rp 688.743.540

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 688.743540 dan Rp 605.701.258. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Pemeliharaan Rp 489.721.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 489.721.000 dan Rp 309.207.019. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan DinasRp61.030.269

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 61,030,269 dan Rp. 69,180,000 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Per 31 Desember 2021 dan 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Perjalanan Dinas	61,030,269	69,180,000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Jumlah	61,030,269	69,180,000

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 272.729.264

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp272.729.264 dan Rp228,368,356 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp366.329

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2021 dan 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**0**	**0**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	366.329	18
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lannya	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	366.329	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**366.329**	**18**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp7.998.431.496

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.998.431.496 dan Rp7.883.149.511

Defisit LO Rp4.508.591.690

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4.508.591.690 dan Rp 4.431.059.616. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	**0**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	**0**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Nilai Koreksi (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	**0**

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	**0**

Transaksi Antar Entitas Rp 4.670.867.234

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.670.867.234 dan Rp4.546.325.601.

Ekuitas Akhir Rp8.160.707.040

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.160.707.040 dan Rp7.998.431.496

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2. INFORMASI AKRUAL

Informasi akrual pada laporan keuangan per 31 Desember 2022 terdapat utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 8.877.118

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta 653256629861000 a.n.

BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

F.4. REVISI DIPA

Hingga tanggal 31 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sangatta melakukan Revisi DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian:

1. Revisi 1 pada tanggal 17 Februari 2022.
2. Revisi 2 pada tanggal 14 Juli 2022
3. Revisi 3 pada tanggal 11 Oktober 2022
4. Revisi 4 pada tanggal 29 November 2022
5. Revisi 5 pada tanggal 15 Desember 2022
6. Revisi 6 pada tanggal 20 Desember 2022
7. Revisi 7 pada tanggal 21 Desember 2022

F.5. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II pernah melakukan ralat SP2D sebanyak 1 kali. Data terlampir.

F.6. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XI/2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2022, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

   Kuasa Pengguna Anggaran : Syahruddin, SE.

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Syahruddin, SE
Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM	:	Arini Widiastuti, S.IP.
Bendahara Pengeluaran	:	Muhamad Rodansa , S.I.P.
Bendahara Penerima	:	Aisyah, S.H., M.H.

2. Hingga 31 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp9.900.000,- atau 99 % dari total anggaran sebesar Rp.10.000.000
3. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19, hingga 31 Desember 2022 Pengadilan Negeri Sangatta telah merealisasikan belanja barang operasional penanganan pandemi covid-19 sebesar Rp11.255.598,- . atau sebesar 99,2% dari total anggaran yang berjumlah Rp.11.300.000,-.

G. LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**	Tanggal	: 06/02/23 7:33 AM
WILAYAH/PROVINSI	**: 1600**	**KALIMANTAN TIMUR**	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	**: 662986**	**PENGADILAN NEGERI SANGATTA**	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**		Tgl Data	: 6/2/23 7:02 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,077,518,000	1,005,436,000	1,004,036,020	0	1,004,036,020	99.86	1,399,980
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	20,000	18,427	0	18,427	92.14	1,573
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	80,112,000	64,212,000	63,358,650	0	63,358,650	98.67	853,350
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	21,999,000	17,881,000	17,719,474	0	17,719,474	99.1	161,526
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	35,700,000	23,240,000	23,240,000	0	23,240,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,167,180,000	1,251,260,000	1,250,540,000	0	1,250,540,000	99.94	720,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	196,139,000	221,558,000	218,759,155	0	218,759,155	98.74	2,798,845
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	58,606,000	55,618,000	55,184,040	0	55,184,040	99.22	433,960
511129	Belanja Uang Makan PNS	236,016,000	207,852,000	200,095,000	0	200,095,000	96.27	7,757,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,866,000	15,200,000	15,200,000	0	15,200,000	100	0
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	162,000,000	128,250,000	128,250,000	0	128,250,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,061,157,000	2,990,527,000	2,976,400,766	0	2,976,400,766	99.53	14,126,234
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,061,157,000	2,990,527,000	2,976,400,766	0	2,976,400,766	99.53	14,126,234
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	513,842,000	500,883,000	499,684,757	0	499,684,757	99.76	1,198,243
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,200,000	43,350,000	43,350,000	0	43,350,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,200,000	23,400,000	23,371,300	0	23,371,300	99.88	28,700
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,400,000	12,000,000	11,941,200	0	11,941,200	99.51	58,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	599,642,000	584,133,000	582,847,257	0	582,847,257	99.78	1,285,743
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,000,000	37,219,000	37,136,750	0	37,136,750	99.78	82,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	32,000,000	37,219,000	37,136,750	0	37,136,750	99.78	82,250
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	96,000,000	104,100,000	104,011,719	0	104,011,719	99.92	88,281
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	1,740,000	1,641,702	0	1,641,702	94.35	98,298
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	3,660,000	3,641,100	0	3,641,100	99.48	18,900
522141	Belanja Sewa	2,000,000	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16,000,000	3,020,000	2,720,000	0	2,720,000	90.07	300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	132,000,000	114,130,000	113,624,521	0	113,624,521	99.56	505,479
5231	Belanja Pemeliharaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal	: 06/02/23 7:33 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 1600	KALIMANTAN TIMUR	Halaman	: 2
SATUAN KERJA	: 662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 6/2/23 7:02 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	215,948,000	228,464,000	228,326,000	0	228,326,000	99.94	138,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	69,000,000	78,660,000	78,525,000	0	78,525,000	99.83	135,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	172,449,000	183,423,000	182,920,000	0	182,920,000	99.73	503,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	457,397,000	490,547,000	489,771,000	0	489,771,000	99.84	776,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	66,760,000	61,770,000	61,030,269	0	61,030,269	98.8	739,731
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	66,760,000	61,770,000	61,030,269	0	61,030,269	98.8	739,731
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,287,799,000	1,287,799,000	1,284,409,797	0	1,284,409,797	99.74	3,389,203
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,000,000	10,000,000	9,900,000	0	9,900,000	99	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	10,000,000	10,000,000	9,900,000	0	9,900,000	99	100,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	10,000,000	10,000,000	9,900,000	0	9,900,000	99	100,000
	JUMLAH BELANJA	4,358,956,000	4,288,326,000	4,270,710,563	0	4,270,710,563	99.59	17,615,437

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
UNIT ORGANISASI	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
KDUAPPAW	**: 005011600KD**	**BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR**
KODE SATKER	**: 662986**	**PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Tgl Data 05/02/23 7:10 PM
Tgl. Cetak 05/02/2023 8:08 PM
lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	100,000	100,000	0	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**100,000**	**100,000**	**0**	**0.00**
ASET TETAP				
Tanah	3,279,400,000	3,279,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,928,389,419	2,511,444,669	416,944,750	16.60
Gedung dan Bangunan	4,873,641,500	4,873,641,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,517,047	27,517,047	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,939,463,808)	(2,666,734,544)	(272,729,264)	10.23
JUMLAH ASET TETAP	**8,169,484,158**	**8,025,268,672**	**144,215,486**	**1.80**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,900,000	4,900,000	0	0.00
Aset Lain-lain	49,531,000	49,531,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,431,000)	(54,431,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**8,169,584,158**	**8,025,368,672**	**144,215,486**	**1.80**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,877,118	26,937,176	(18,060,058)	(67.05)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**8,877,118**	**26,937,176**	**(18,060,058)**	**(67.05)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**8,877,118**	**26,937,176**	**(18,060,058)**	**(67.05)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,160,707,040	7,998,431,496	162,275,544	2.03
JUMLAH EKUITAS	**8,160,707,040**	**7,998,431,496**	**162,275,544**	**2.03**
JUMLAH EKUITAS	**8,160,707,040**	**7,998,431,496**	**162,275,544**	**2.03**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**8,169,584,158**	**8,025,368,672**	**144,215,486**	**1.80**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

Waktu Olap: 2023-02-05 19:08:26.0 [B@43ae542d
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 05/02/23 8:08 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	5,286,000	6,888,079	1,602,079	130	0	6,796,368	6,796,368	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	5,286,000	6,888,079	1,602,079	130	0	6,796,368	6,796,368	130
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,990,527,000	2,976,400,766	(14,126,234)	100	3,221,268,000	3,200,841,095	20,426,905	99
	BELANJA BARANG	1,287,799,000	1,284,409,797	(3,389,203)	100	1,031,374,000	1,017,632,874	13,741,126	99
	BELANJA MODAL	10,000,000	9,900,000	(100,000)	99	334,500,000	334,458,000	42,000	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG 005**

ESELON I : **BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01**

SATUAN KERJA : **PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986**

Waktu Olap: 2023-02-05 19:08:26.0 [B@71164e03

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 05/02/23 8:08 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,288,326,000	4,270,710,563	(17,615,437)	100	4,587,142,000	4,552,931,969	34,210,031	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI	: 1600	KALIMANTAN TIMUR
JENIS SATUAN KERJA	: KD	
SATUAN KERJA	: 662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 05/02/23 7:11 PM

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 05/02/23 8:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,998,431,496	7,883,149,511	115,281,985	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,508,591,690)	(4,431,059,616)	(77,532,074)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	16,000	(16,000)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	16,000	(16,000)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,670,867,234	4,546,325,601	124,541,633	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	162,275,544	115,281,985	46,993,559	-
EKUITAS AKHIR	8,160,707,040	7,998,431,496	162,275,544	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI	: 1600	KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA	: 662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 05/02/23 8:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 05/02/23 7:11 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,521,750	6,796,350	(274,600)	(4.04)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,521,750	6,796,350	(274,600)	(4.04)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,521,750	6,796,350	(274,600)	(4.04)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,966,118,946	3,191,472,851	(225,353,905)	(7.061)
Beban Persediaan	37,136,750	33,926,500	3,210,250	9.462
Beban Barang dan Jasa	688,743,540	605,701,258	83,042,282	13.71
Beban Pemeliharaan	489,721,000	309,207,019	180,513,981	58.38
Beban Perjalanan Dinas	61,030,269	69,180,000	(8,149,731)	(11.78)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI	: 1600	KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA	: 662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 05/02/23 8:07 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 05/02/23 7:11 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	272,729,264	228,368,356	44,360,908	19.425
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,515,479,769	4,437,855,984	77,623,785	1.749
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,508,958,019)	(4,431,059,634)	(77,898,385)	1.758
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	366,329	18	366,311	2,035,061.111
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	366,329	18	366,311	2,035,061.111
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	366,329	18	366,311	2,035,061.111
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,508,591,690)	(4,431,059,616)	(77,532,074)	1.75
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,508,591,690)	(4,431,059,616)	(77,532,074)	1.75

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00112A | Tanggal 06-Des-2022 | Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 24.094.880,00

**** DUA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.662986/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022		Jenis Tagihan : KOREKSI Penghasilan PPNPN Induk Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
662986.046.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.1602.2.000000.000000	24.272.000,00
Jumlah Pengeluaran	24.272.000,00
POTONGAN	**JUMLAH UANG**
440780.999.811141.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999134.000000	177.120,00
Jumlah Potongan	177.120,00
TOTAL PEMBAYARAN	24.094.880,00

Kepada:

Nomor	: 856592	Bank / Pos	: Terlampir
Nama Supplier	: PARA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI	Rekening	: Terlampir
NPWP1	: 001035112724000	Nama Pemilik	: Terlampir
NPWP2	: 001035112724000	Uraian	: Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji Induk PPNPN Bulan Desember Tahun 2022 untuk 7 Pegawai, sesuai SK Nomor W18-U7/25-31/KP.00.2/I/2022, tgl 3 Januari 2022
NOP	:		
ALAMAT	:		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Kutai Timur, 6 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

ARINI WIDIASTUTI, S.IP.
NIP 197409182006042001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00112A

Tanggal : 06-Des-2022

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ABIDIN NOOR 056301008992532 000000000724000	3.280.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA ABIDIN NOOR
2	DESY WULANDARI 712901015986539 606852143724000	3.247.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA DESI WULANDARI
3	HERDIYANTO 712901008713539 000000000724000	3.571.920,00	BANK RAKYAT INDONESIA HERDIYANTO
4	HERNI 056301073393501 000000000724000	3.280.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA HERNI
5	MUH SYAHRUR 056301045381506 679867119724000	3.571.920,00	BANK RAKYAT INDONESIA MUH SYAHRUR
6	PENGKY PADLI 712901008714535 000000000724000	3.571.920,00	BANK RAKYAT INDONESIA PENGKY PADLI
7	SUMARDI 014001075042504 985003771724000	3.571.920,00	BANK RAKYAT INDONESIA SUMARDI
JUMLAH		24.094.880,00	

Kutai Timur, 6 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

ARINI WIDIASTUTI, S.IP.
NIP 197409182006042001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SANGATTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KOREKSI COA DETAIL 15/16SEG

Nomor SPM : 00112A
Tanggal : 06-Desember-2022

No	Detail Coa Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	Nilai Awal	Nilai Baru
PENGELUARAN			
662986.046.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.1602.2.000000.000000			
1	994.002.0A.000028-Satpam	9.840.000,00	7.216.000,00
2	994.002.0A.000030-Pengemudi	7.216.000,00	7.216.000,00
3	994.002.0A.000032-Pramubakti	7.216.000,00	9.840.000,00
	Jumlah	**24.272.000,00**	**24.272.000,00**
TOTAL PENGELUARAN		**24.272.000,00**	**24.272.000,00**
POTONGAN			
440780.999.811141.9999900.0000000.0000000000.00000.2.0100.0.999134.000000			
	Jumlah	**177.120,00**	**177.120,00**
TOTAL POTONGAN		**177.120,00**	**177.120,00**

Kutai Timur, 6 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

ARINI WIDIASTUTI, S.IP.
NIP 197409182006042001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 220461301026230

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	220461301026230	07-12-2022	07-12-2022	24,094,880	00112T/662986/2022	06-12-2022	PENGHASILAN PPNPN INDUK	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji Induk PPNPN Bulan Desember Tahun 2022 untuk 7 Pegawai, sesuai SK Nomor W18-U7/25-31/KP.00.2/I/2022, tgl 3 Januari 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 12-12-22 15:31:24 oleh : 662986

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jalan Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH. Nomor 01
Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324
Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta – Kabupaten Kutai Timur

Sangatta, 13 Desember 2022

Nomor : W18-U7/1992 /KU.03/ XII /2022
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permintaan Koreksi Data SPM/SP2D.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
Jl. M. Yamin No.2, Gn. Kelua
Samarinda - 75123

Bersama surat ini, kami menyampaikan permintaan koreksi data SPM/SP2D dengan perincian sebagai berikut :

Nomor SPM : 00112A

Tanggal SPM : 6 Desember 2022

Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D : 220461301026230

Tanggal SP2D : 07-12-2022

Dengan detail koreksi sebagaimana terlampir.

Koreksi dimaksud di atas dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Salah input nominal dalam pembebanan COA

No.	Detil COA	Semula	Menjadi
1	994.002.0A.000028-Satpam	9.840.000,00	7.216.000,00
2	994.002.0A.000030-Pengemudi	7.216.000,00	7.216.000,00
3	994.002.0A.000032-Pramubakti	7.216.000,00	9.840.000,00

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Sangatta

SYAHRUDDIN,S.E.
NIP. 197806272009041002

Lampiran Surat : W18-U7/1447/KU.03/XII/2022

Tanggal : 13 Desember 2022

DETIL PERMINTAAN KOREKSI

Bagan Akun Standar *)							
BAS Semula			Nilai Semula	BAS Koreksi			Nilai Koreksi
Kode Satker	:	662986	24.272.000	Kode Satker	:	662986	24.272.000
Kode KPPN	:	046		Kode KPPN	:	046	
Akun	:	521111		Akun	:	521111	
Program	:	005.01WA		Program	:	005.01WA	
Keg/Output	:	1066EBA		Keg/Output	:	1066EBA	
Sumber Dana	:	A		Sumber Dana	:	A	
Cara Tarik	:	0		Cara Tarik	:	0	
Register P/H	:	000000001		Register P/H	:	000000001	
Kewenangan	:	2		Kewenangan	:	2	
Lokasi	:	1602		Lokasi	:	1602	

Catatan :

Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai Total Pengeluaran ataupun Total Penerimaan serta Jumlah Keseluruhan dan kami telah mempertimbangkan ketersediaan dana pada DIPA satker kami.

Uraian Deskripsi*)	
Semula	Koreksi
Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji Induk PPNPN Bulan Desember Tahun 2022 Untuk 7 Pegawai, sesuai SK Nomor W18-U7/25-31/KP.00.2/I/2022, tgl 3 Januari 2022. COA : 994.002.0A.000028-Satpam Rp. 9.840.000,- COA : 994.002.0A.000030-Pengemudi Rp.7.216.000,- COA : 994.002.0A.00032-Pramubakti Rp. 7.216.000,-	Pembayaran Belanja Barang Berupa Gaji Induk PPNPN Bulan Desember Tahun 2022 Untuk 7 Pegawai, sesuai SK Nomor W18-U7/25-31/KP.00.2/I/2022, tgl 3 Januari 2022. COA : 994.002.0A.000028-Satpam Rp. 7.216.000,-,- COA : 994.002.0A.000030-Pengemudi Rp.7.216.000,- COA : 994.002.0A.00032-Pramubakti Rp. 9.840.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran,
Pengadilan Negeri Sangatta

SYAHRUDDIN,S.E.
NIP. 197806272009041002

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jalan Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH. Nomor 01
Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324
Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta – Kabupaten Kutai Timur

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : W18-U7/1493/KU.03/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	SYAHRUDDIN,S.E.
NIP	:	197806272009041002
Jabatan	:	Kuasa Penggunan Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perbaikan atas kesalahan SPM/SP2D dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sangatta.
2. Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan SPM/SP2D ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya.

Sangatta, 13 Desember 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

SYAHRUDDIN,S.E.
NIP. 197806272009041002

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA – KUTAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 02 Januari 2023

Sekretaris,

Syahruddin, SE.

NIP 19780627 200904 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	7
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	8
	A. Penjelasan Umum	8
	B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
	C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	18
	D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	20
	E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	21
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	25
	G. Lampiran Lampiran	28

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
KELAS II

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

id.pn-sangatta.go.id e-mail : pn_sangatta@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 02 Januari 2023

Sekretaris

Syabruddin, SE.

NIP 19780627 200904 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp26.902.500 atau mencapai 134 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp20.015.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp116.771.500 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp121.392.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp436.371.877 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Terdapat Nilai Kewajiban sebesar Rp. 436.053.877 berupa biaya proses atau dana pihak ketiga lainnya dan per 31 Desember 2022 Ekuitas sebesar Rp436.371.877

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.902.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp122.786.924 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp95.884.424). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp95.884.424).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp118.000 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp95.884.424) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp96.084.424 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp318.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	20,015,000.	26,902,500.	6,887,500.	134	17,282,000.	24,220,500.	41,502,500.	140
	PENERIMAAN HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	20,015,000.	26,902,500.	6,887,500.	134	17,282,000.	24,220,500.	41,502,500.	140
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA BARANG	121,392,000.	116,771,500.	(4,620,500.)	96	121,392,000.	119,514,500.	1,877,500.	98
	BELANJA MODAL	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA SUBSIDI	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA HIBAH	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0

	Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Data Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	Dana Desa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	121,392,000.	116,771,500.	(4,620,500.)	96	121,392,000.	119,514,500.	1,877,500.	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	436,053,877.	0	436,053,877	0.00
Persediaan	318,000.	118,000	200,000	169.49
JUMLAH ASET LANCAR	**436,371,877.**	**118,000**	**436,253,877**	**369,706.68**
JUMLAH ASET	**436,371,877.**	**118,000**	**436,253,877**	**369,706.68**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	436,053,877.	0	436,053,877	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**436,053,877.**	**0**	**436,053,877**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**436,053,877.**	**0**	**436,053,877**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	318,000.	118,000	200,000	169.49
JUMLAH EKUITAS	**318,000.**	**118,000**	**200,000**	**169.49**
JUMLAH EKUITAS	**318,000.**	**118,000**	**200,000**	**169.49**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**436,371,877**	**118,000**	**436,253,877**	**369,706.68**

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	26,902,500.	24,220,500.	2,682,000.	11.073
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	26,902,500.	24,220,500.	2,682,000.	11.073
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	
Jumlah Pendapatan	26,902,500.	24,220,500.	2,682,000.	11.073
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	
Beban Pegawai	0.	0.	0.	
Beban Persediaan	31,732,924.	28,754,338.	2,978,586.	10.359

Beban Barang dan Jasa	67,654,000.	87,625,500.	(19,971,500.)	(22.792)
Beban Pemeliharaan	0.	0.	0.	
Beban Perjalanan Dinas	23,400,000.	9,500,000.	13,900,000.	146.316
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	
Beban Bunga	0.	0.	0.	
Beban Subsidi	0.	0.	0.	
Beban Hibah	0.	0.	0.	
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.	0.	0.	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	
Beban Transfer	0.	0.	0.	
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	
JUMLAH BEBAN	122,786,924.	125,879,838.	(3,092,914.)	(2.457)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(95,884,424.)	(101,659,338.)	5,774,914.	(5.681)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(95,884,424.)	(101,659,338.)	5,774,914.	(5.681)
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(95,884,424.)	(101,659,338.)	5,774,914.	(5.681)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	118,000.	13,000.	105,000.	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95,884,424.)	(101,659,338.)	5,774,914.	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0.	0.	0.	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	13,000.	(13,000.)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.	13,000.	(13,000.)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0.	0.	0.	-
SELISIH REVALUASI ASET	0.	0.	0.	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	0.	0.	-
LAIN-LAIN	0.	0.	0.	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	96,084,424.	101,751,338.	(5,666,914.)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	200,000.	105,000.	95,000.	-
EKUITAS AKHIR	**318,000.**	**118,000.**	**200,000.**	-

(Dalam Rupiah)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No 01 – Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kutai Timur , Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelsaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

   Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp310.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
     Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan peluanasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp26.902.500.

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.902.500 atau 134 persen dari estimasi

pendapatan sebesar Rp20.015.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan uang meja leges.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	Rp20.015.000	26.902.500	134
Jumlah	Rp20.015.000	26.902.500	134

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.682.000 atau 7 persen dibandingkan 31 Desember 2021.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) Rp	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	26.902.500	24.220.500	2.682.000	7
Jumlah	26.902.500	24.220.500	2.682.000	7

B2. Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp.116.771.500

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp116.771.500 atau 96 persen dari anggaran belanja sebesar Rp121.392.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	121.392.000	116.771.500	96
Jumlah Belanja Kotor	121.392.000	116.771.500	**96**
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah	121.392.000	116.771.500	**96**

Belanja Barang Rp116.771.500

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 116.771.500 dan Rp119.514.500.

URAIAN	REALISASI 31 Des 2022	REALISASI 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	116.771.500	119.514.500	(2)
Jumlah Belanja Barang	**116.771.500**	**119514.500**	**(2)**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 03 654446629871000	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Kas di Bendahara Penerima Rp0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerima per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas lainnya atau setara kas Rp.436.053.877

C.3. Saldo kas lainnya atau setara kas

Saldo kas lainnya atau setara kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar 436.053.877 . Saldo kas lainnya atau setara kas adalah uang panjar perkara dan uang titipan pihak ketiga yang dititipkan pada rekening perkara Pengadilan Negeri Sangatta.

Persediaan Rp318.000.

C.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp318.000 dan Rp118.000

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	318.000	118.000
Jumlah	**318.000**	**118.000**

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.5. Uang Muka dari KPPN

Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas Rp318.000.

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp318.000 dan Rp118.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp26.902.500

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.26.902.500 dan Rp24.220.500

Beban Persediaan Rp31.732.924

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp31.732.924 dan Rp28.754.338. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa Rp67.654.000

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan

2021 adalah masing-masing sebesar Rp67.654.000 dan Rp87.625.500. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Perjalanan Dinas Rp23.400.000

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.400.000 dan Rp9.500.000 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Surpslus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp(95.884.424)

D.5. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember adalah masing-masing sebesar Rp95.884.424 dan Rp101.659.338

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp118.000

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp118.000 dan Rp.13.000

Defisit LO (R95.884.424)

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp95.884.424) dan (Rp.101.659.338). Defisit LO merupakan selisih /kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan

kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.000 dan Rp0 Koreksi Nilai Persediaan pada 31 Desember 2021 sebagai akibat dari kesalahan pencatatan persediaan berupa buku-buku register, yang seharusnya menjadi Saldo Awal 31 Desember 2022 namun dicatat sebagai transaksi Transfer Masuk. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	**0**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
Jumlah	**0**

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

KorekSI Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	**0**

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp96.084.424

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp96.084.424 dan Rp101.751.338 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(26.902.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	116.771.500
Transfer Masuk	6.215.424
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	**96.084.424**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp26.902.500) sedangkan DKEL sebesar Rp116.771.500.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.215.424 dan tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan

Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas Akhir Rp318.000

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp318.000 dan Rp118.000

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.3. INFORMASI AKRUAL

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 31 Desember 2022

F.4. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 654446629871000 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per

tanggal 31 Desember sebesar Rp0.

2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000742-31-7 a.n. RPL 046 PN SANGATTA UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp436,053,877

F.5. REVISI DIPA

Hingga tanggal 31 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II melakukan Revisi sebanyak dua kali

1. Revisi ke 1 Tanggal 13 Oktober 2022
2. Revisi ke 2 tanggal 01 Desember 2022

F.6. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada melakukan Rlat SPM, SP2D, SSBP Dan SSPB.

F.7. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/31 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2022, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Syahruddin, SE.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Syahruddin, SE.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM	:	Arini Widiastuti, S.IP.

Bendahara Pengeluaran	:	M Rodansa, S.I.P.
Bendahara Penerima	:	Aisyah, S.H., M.H.

G . lampiran lampiran

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI	: 1600	KALIMANTAN TIMUR
JENIS SATUAN KERJA	: KD	
SATUAN KERJA	: 662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 24/01/23 8:02 PM

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 24/01/23 8:11 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	118,000	13,000	105,000	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95,884,424)	(101,659,338)	5,774,914	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	13,000	(13,000)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	13,000	(13,000)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	96,084,424	101,751,338	(5,666,914)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	200,000	105,000	95,000	-
EKUITAS AKHIR	318,000	118,000	200,000	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **005** **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : **03** **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : **005031600KD** **BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA : **662987** **PENGADILAN NEGERI SANGATTA**
JENIS SATUAN KERJA : **KD**

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 24/01/23 8:02 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 24/01/23 8:01 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	26,902,500	24,220,500	2,682,000	11.073
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	26,902,500	24,220,500	2,682,000	11.073
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	26,902,500	24,220,500	2,682,000	11.073
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	31,732,924	28,754,338	2,978,586	10.359
Beban Barang dan Jasa	67,654,000	87,625,500	(19,971,500)	(22.792)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	23,400,000	9,500,000	13,900,000	146.316
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	
ESELON I	: 03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 005031600KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR	Tanggal : 24/01/23 8:02 PM
SATUAN KERJA	: 662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
			Tgl Data : 24/01/23 8:01 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	122,786,924	125,879,838	(3,092,914)	(2.457)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(95,884,424)	(101,659,338)	5,774,914	(5.681)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(95,884,424)	(101,659,338)	5,774,914	(5.681)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(95,884,424)	(101,659,338)	5,774,914	(5.681)

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
UNIT ORGANISASI	**: 03**	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
KDUAPPAW	**: 005031600KD**	**BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR**
KODE SATKER	**: 662987**	**PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Tgl Data 24/01/23 4:14 PM
Tgl. Cetak 24/01/2023 7:55 PM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	436,053,877	0	436,053,877	0.00
Persediaan	318,000	118,000	200,000	169.49
JUMLAH ASET LANCAR	**436,371,877**	**118,000**	**436,253,877**	**369,706.68**
JUMLAH ASET	**436,371,877**	**118,000**	**436,253,877**	**369,706.68**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	436,053,877	0	436,053,877	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**436,053,877**	**0**	**436,053,877**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**436,053,877**	**0**	**436,053,877**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	318,000	118,000	200,000	169.49
JUMLAH EKUITAS	**318,000**	**118,000**	**200,000**	**169.49**
JUMLAH EKUITAS	**318,000**	**118,000**	**200,000**	**169.49**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**436,371,877**	**118,000**	**436,253,877**	**369,706.68**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG 005**

ESELON I : **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03**

SATUAN KERJA : **PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662987**

Waktu Olap: 2023-01-24 16:11:31.0 [B@31995fe4

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 24/01/23 7:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	20,015,000	26,902,500	6,887,500	134	17,282,000	24,220,500	41,502,500	140
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	20,015,000	26,902,500	6,887,500	134	17,282,000	24,220,500	41,502,500	140
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	121,392,000	116,771,500	(4,620,500)	96	121,392,000	119,514,500	1,877,500	98
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG 005**

ESELON I : **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03**

SATUAN KERJA : **PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662987**

Waktu Olap: 2023-01-24 16:11:31.0 [B@2d08f11c

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 24/01/23 7:28 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	121,392,000	116,771,500	(4,620,500)	96	121,392,000	119,514,500	1,877,500	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI SANGATTA (662987)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001004085304)
Virtual Account : 654446629871000 | BPG 046 PN SANGATTA 03
Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-07	15:12:24	9562961	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang 220461301026231000001	0,00	0,00	6.525.850,00	6.525.850,00	SPAN	
2022-12-13	14:19:31	9765164	MUHAMAD RODANSA	6.525.850,00	6.525.850,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		6.525.850,00	6.525.850,00			
			Saldo Akhir				0,00		

BRI Virtual Dashboard
Last Update : 25-01-2023 Pukul 15:06:01